
Harmoni Dialektika Hegel Dalam Politik Indonesia: Pergulatan Penegakan Sistem Demokrasi

Nikodemus^{1a*}, Ike Dian Puspita Sari^{2b}

STT Pastor Bonus, Pontianak, Indonesia¹, Universitas Insan Budi Utomo, Malang, Indonesia²
nikodemuspangareho@gmail.com^a, ikedianpuspitasari@uibu.ac.id^b

Abstrak: Studi ini menaruh perhatian pada konsep harmoni dialektika Hegel dalam konteks politik Indonesia dengan penekanan pada dinamika pergulatan antara tesis, antitesis, dan perjalanan menuju sintesis dalam upaya penegakan demokrasi. Analisis tesis mencakup aspek positif dalam politik Indonesia, memberikan pemahaman mendalam tentang fondasi yang ada. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan pemikiran Hegel tentang harmoni dialektika. Berdasarkan analisis penulis menemukan antitesis mengidentifikasi tantangan dan kontroversi yang menghambat perkembangan demokrasi. Konsep konkrit menuju sintesis membahas inisiatif dan perubahan yang diimplementasikan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Indonesia. Dengan memanfaatkan teori dialektika Hegel, tulisan ini menunjukkan bagaimana konflik dan transformasi politik merupakan bagian integral dari evolusi demokrasi di Indonesia. Analisis reflektif terhadap harmoni dialektika Hegel mencerminkan usaha untuk memahami sejauh mana filosofi ini dapat memberikan panduan dalam mengatasi ketegangan politik. Penulis menyajikan gambaran terpadu tentang perjalanan politik Indonesia, menyoroti pencapaian dalam sintesis dan memberikan wawasan terhadap arah masa depan penegakan demokrasi dengan prinsip-prinsip dialektika Hegel.

Kata Kunci: Harmoni Dialektika Hegel, Politik Indonesia, Evolusi Politik dan Penegakan Demokrasi.

Abstract: *This study pays attention to Hegel's concept of dialectical harmony in the Indonesian political context with an emphasis on the dynamics of the struggle between thesis, antithesis, and the journey towards synthesis in efforts to uphold democracy. The thesis analysis covers positive aspects in Indonesian politics, providing an in-depth understanding of the existing foundations. The author uses descriptive analysis methods and Hegel's thinking about dialectical harmony. Based on the analysis, the author finds that antithesis identifies challenges and controversies that hinder the development of democracy. Concrete concepts towards synthesis discuss initiatives and changes implemented to overcome obstacles that occur in Indonesia. By utilizing Hegel's dialectical theory, this article shows how conflict and political transformation are an integral part of the evolution of democracy in Indonesia. Reflective analysis of Hegel's dialectical harmony reflects an attempt to understand the extent to which this philosophy can provide guidance in resolving political tensions. The author presents an integrated picture of Indonesia's political journey, highlighting achievements in synthesis and providing insight into the future direction of upholding democracy with the principles of Hegel's dialectics.*

Keywords: *Hegel's Dialectical Harmony, Indonesian Politics, Political Evolution and the Establishment of Democracy.*

Article info: Submitted | Accepted | Published
07-10-2025 | 26-01-2026 | 10-02-2026

LATAR BELAKANG

Mengenali konsep harmoni dialektika Hegel menjadi fokus utama dalam menganalisis dinamika politik Indonesia (Wahyuddin, 2016). Dengan menekankan pergulatan antara tesis, antitesis dan perjalanan menuju sintesis. Penulisan ini memperhatikan peran fundamental konsep filosofis yang terjadi dalam konteks politik Indonesia. Analisis terhadap tesis politik Indonesia membuka pintu untuk pemahaman lebih mendalam terkait fondasi yang ada dan menjadi jembatan bagi pembahasan politik Indonesia (Ranubaya, 2023). Politik di Indonesia perlu dibahas karena mengandung kebaruan pikiran yang dinamis namun tidak tampak seperti “politik abu-abu”. Hal ini bisa terjadi karena masih ada manusia yang berpolitik yang tidak sehat.

Menguraikan tesis positif terhadap politik yang ada Indonesia, penulis mengadopsi metode analisis filosofis dan merangkum pemikiran Hegel mengenai harmoni dialektika (Wahyuddin, 2016). Pemahaman ini menjadi landasan untuk melihat lebih jauh bagaimana konsep penegakkan demokrasi memainkan peran dalam transformasi politik Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa antitesis yang muncul mengidentifikasi tantangan dan kontroversi yang menjadi hambatan signifikan dalam perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Hambatan penegakkan demokrasi di Indonesia bisa terjadi karena tidak konsisten terhadap aturan yang sudah disepakati bersama. Ketidakkonsistenan ini yang membuat bangsa Indonesia sulit maju dalam berpolitik dan bijak dalam berpolitik.

Melibatkan konsep konkrit menuju sintesis, studi ini menyoroti inisiatif dan perubahan konkret yang diimplementasikan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Indonesia. Sebagai bentuk integral dari evolusi demokrasi, sintesis ini menjadi fokus krusial untuk memahami bagaimana konflik dan transformasi politik memainkan peran dalam perjalanan politik Indonesia (Endi, 2023). Sintesis dari pemikiran Hegel menjadi tindakan dan penegakkan yang konsisten agar tidak terjadi penyimpangan sosial terhadap aturan. Maka dari itu, dengan tegas penegakkan hukum dan konsisten terhadap aturan yang ada di Indonesia harus diperjuangkan demi keadilan bangsa Indonesia.

Melalui penerapan teori dialektika Hegel (Wahyuddin, 2016), tulisan ini membuka jendela dan membuka pikiran manusia yang berpolitik di Indonesia. Agar mempunyai pemahaman bahwa konflik dan transformasi politik bukanlah anomali, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Tanpa adanya demokrasi perjalanan politik yang ada di Indonesia akan menjadi kaku dan tidak bebas bersuara (tidak bebas berpendapat). Analisis penulis terhadap harmoni dialektika Hegel mencerminkan upaya untuk memahami sejauh mana filosofi politik di Indonesia dapat memberikan panduan dalam mengelola ketegangan politik (seperti pemilihan presiden).

Memahami dan merangkum perjalanan politik di Indonesia (Endi, 2023). Penulisan bukan hanya memberikan gambaran terpadu tentang pencapaian dalam sintesis, tetapi juga memberikan wawasan terhadap arah masa depan penegakan demokrasi di Indonesia agar politik tidak berjalan satu kaki (penyimpangan sosial). Dengan prinsip-prinsip dialektika Hegel sebagai landasan untuk memahami politik yang ada di Indonesia. Pengamatan ini menjadi upaya penting untuk menavigasi kompleksitas politik Indonesia dengan merinci peran dan pengaruh harmoni dialektika dalam evolusi demokrasi bangsa Indonesia.

Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana konsep harmoni dialektika Hegel mewarnai dinamika politik di Indonesia khususnya dalam konteks upaya penegakan demokrasi dengan menitikberatkan pada pergulatan antara tesis, antitesis dan perjalanan menuju sintesis?

Apa saja aspek positif dalam politik Indonesia yang dianalisis sebagai bagian dari tesis, memberikan pemahaman mendalam tentang fondasi politik yang ada dalam konteks penerapan harmoni dialektika Hegel? Bagaimana antitesis yang diidentifikasi dalam analisis menyoroti tantangan dan kontroversi yang menjadi hambatan utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia dan apa implikasinya terhadap konsep harmoni dialektika Hegel?

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan. Penulis menyoroti konsep harmoni dialektika Hegel dalam konteks politik Indonesia dengan fokus pada dinamika pergulatan antara tesis, antitesis, dan perjalanan menuju sintesis dalam upaya penegakan demokrasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kepustakaan, serta pemikiran Hegel tentang harmoni dialektika. Analisis tesis mengungkapkan aspek positif dalam politik Indonesia, memberikan wawasan mendalam tentang fondasi yang ada. Penulis mengidentifikasi antitesis yang mencakup tantangan dan kontroversi yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep konkret menuju sintesis dibahas, mengungkap inisiatif dan perubahan yang diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan menggunakan teori dialektika Hegel, tulisan ini menunjukkan bagaimana konflik dan transformasi politik merupakan bagian integral dari evolusi demokrasi di Indonesia. Analisis reflektif terhadap harmoni dialektika Hegel mencerminkan usaha untuk memahami sejauh mana filosofi ini dapat memberikan panduan dalam mengatasi ketegangan politik. Penulis menyajikan gambaran terpadu tentang perjalanan politik Indonesia, menyoroti pencapaian dalam sintesis, dan memberikan wawasan terhadap arah masa depan penegakan demokrasi dengan prinsip-prinsip dialektika Hegel. Hasil dari tulisan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran penting konsep harmoni dialektika Hegel dalam dinamika politik Indonesia dan menawarkan pandangan optimis terhadap kemajuan masa depan demokrasi di negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Hegel

Hegel lahir di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Pada masa kecilnya, Hegel sangat berdedikasi dalam membaca berbagai jenis literatur, surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan mengenai berbagai topik (Gazali, 2014). Minat membaca yang kuat ini sebagian besar dipengaruhi oleh ibunya yang sangat progresif dan aktif dalam mendukung perkembangan intelektual anak-anaknya. Keluarga Hegel adalah keluarga kelas menengah yang stabil di Stuttgart, dengan ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri di administrasi pemerintahan Wurttemberg. Meskipun Hegel mengalami kesehatan yang lemah dan hampir meninggal karena cacar sebelum mencapai usia enam tahun, serta memiliki hubungan erat dengan kakak perempuannya, Christiane, yang tetap akrab sepanjang hidup Hegel.

Hegel muda tidak menguatkan diri dalam kehidupan dan popularitasnya. Awalnya, Hegel bekerja sebagai dosen pribadi dan mendapatkan kesempatan untuk belajar filsafat di Universitas Jena, bergabung dengan teman-temannya Schelling pada tahun 1801, dan kemudian menjadi dosen filsafat. Pada tahun 1791, Hegel meraih gelar Doktor dalam bidang theologia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika karya awal Hegel berkaitan dengan agama Kristen, seperti *"The Life of Jesus"* dan *"The Spirit of Christianity"* (Gazali, 2014). Tulisan-tulisan ini yang membuka pikiran Hegel sekaligus membuka pikiran manusia secara filosofis.

Pada tahun 1806, ketika Jena diduduki oleh Napoleon, Hegel melarikan diri ke Nuremberg dan menjadi Kepala Sekolah Gymnasium (Al Azis, 2021). Nama Hegel menjadi sangat populer di Berlin, sehingga mahasiswanya merujuk padanya dengan sebutan “professor professorium”. Hegel mencapai puncak popularitasnya saat munculnya Idealisme Jerman. Meskipun Hegel lebih tua dari Schelling, yang meninggal pada tahun 1854, Hegel menyusun karya-karya pentingnya saat Schelling sudah menjadi filsuf terkenal. Awalnya dianggap sebagai murid Schelling, Hegel kemudian mengembangkan pandangannya sendiri, bahkan berbeda pendapat dengan pemikiran Schelling (Gazali, 2014).

Hegel adalah Filsuf besar abad ke-19. Pengaruhnya sangat besar pada pemikiran Karl Marx, terutama dalam dialektika materialisnya. Meskipun Marx mengakui sebagai murid Hegel, dia juga menyatakan perbedaan dialektikanya dengan Hegel (Huda & Riski, 2022). Pemikiran Hegel muncul dalam konteks problematik, di mana terjadi perpecahan dan silang berbeda pendapat dalam pemahaman dan penerapan iman Kristen, terutama seiring dengan peristiwa-proses reformasi oleh Martin Luther pada abad ke-16 dan munculnya aliran Calvinis. Selain itu, tuntutan revolusi Perancis 1789 juga memainkan peran penting dalam latar belakang pemikiran Hegel (Gazali, 2014). Dalam upayanya mencari jawaban atas problematik tersebut, Hegel menggunakan istilah-istilah sekuler dan merujuk pada warisan filsafat Yunani, terutama Aristoteles. Dalam bukunya “*History of Philosophy*”, Hegel bahkan menyebut Aristoteles sebagai filsuf Yunani yang sangat penting untuk dipelajari, mengingat Plato memberikan prinsip-prinsip umum yang abstrak, sedangkan Aristoteles membawa pemikiran tersebut ke tingkat konkret (Gazali, 2014).

Beberapa karya penting Hegel antara lain “*Phenomenology of Spirit*” (1807), “*Science of Logic*” (1812-1816), “*Encyclopedia of the Philosophical Sciences*” (1817), dan “*Outlines of the Philosophy of Right*” (1821). Setelah meninggal pada tahun 1831, karya-karya Hegel diterbitkan oleh para mahasiswa, mencakup bidang-bidang seperti filsafat kesenian, filsafat sejarah, filsafat agama, dan sejarah filsafat. Hegel diingat sebagai seorang dosen yang tekun, cermat, dan jelas. Daya tariknya tidak hanya terletak pada keindahan bahasanya atau keangkeran tertentu, tetapi juga karena kedalaman dan cakupan pemikirannya yang luas. (Gazali, 2014).

Landasan Teoritis Hegel

Hegel dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Hegel filsuf Jerman yang hidup di sekitaran abad ke-19 mengemukakan bahwasannya dialektik merujuk pada proses pihak-pihak yang saling berlawanan (Al Azis, 2021). Menurut Hegel, dialektika adalah proses penyatuan dua hal yang bertentangan, yang umumnya dikenal dengan istilah tesis (pembenaran), antitesis (penolakan), dan sintesis (penyatuan kontradiksi). Pengertian harus memiliki dasar pengetahuan empiris yang dapat dirasakan secara indrawi. Maknanya berasal dari penggunaan sehari-hari yang bersifat spontan, bukan hasil refleksi sehingga terasa abstrak, umum, statis, dan konseptual. Pengertian ini dijelaskan secara radikal sehingga dalam proses berpikirnya menjadi kurang tegas dan lebih fleksibel.

Pengingkaran melibatkan konsep pertama (pembenaran) yang dihadapi, diartikulasikan secara berlawanan, menghasilkan konsep kedua yang bersifat kosong, formal, tidak pasti, dan tak terbatas. Menurut Hegel, pada konsep kedua sebenarnya terdapat pengertian dari konsep pertama. Konsep pemikiran kedua ini juga dijelaskan secara radikal untuk menghilangkan kejelasan dan memberikan ruang pada fleksibilitas pemikiran. Kontradiksi dianggap sebagai

penggerak dialektika, jalannya menuju kebenaran, dan oleh karena itu, kontradiksi harus mampu menghasilkan konsep yang dapat bertahan dan saling mengevaluasi. Kesatuan kontradiksi dianggap sebagai alat untuk melengkapi dua konsep pengertian yang saling bertentangan sehingga dapat tercipta konsep baru yang lebih ideal. (Rohani et al., 2022).

Hegel menyatakan bahwa yang benar-benar nyata adalah yang rasional, dan sebaliknya, yang rasional adalah yang nyata. Walaupun demikian, pengidentifikasian terhadap yang nyata dan yang rasional ini memberikan kepuasan yang tak terpisahkan dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada merupakan keseluruhan yang benar-benar lengkap, dengan segala kompleksitasnya yang Hegel sebut sebagai “yang mutlak” yang pada intinya bersifat spiritual (Al Azis, 2021). Hegel membedakan dirinya dari individu lain yang memiliki pandangan metafisika serupa dengan dua aspek utama. Pertama, ia menekankan pada logika, dengan pandangan bahwa hakikat realitas dapat diperoleh melalui pertimbangan tunggal bahwa realitas tidak boleh bertentangan atau kontradiktif. Aspek kedua yang khas dan erat kaitannya dengan yang pertama adalah penggunaan gerakan tiga tahap yang disebut “dialektik” yang terdiri dari tesis, antitesis, dan sintesis. (Wahyuddin, 2016).

Dengan kekuatan logika, segala predikat yang tersirat dapat ditarik hingga mencapai kesimpulan akhir yang disebut sebagai “ide yang mutlak” (absolut idea). Selama proses ini, diasumsikan bahwa kebenaran yang sejati hanya dapat ditemukan dalam konteks realitas keseluruhan. Filosofi Hegel berakar pada keyakinan bahwa “ide yang dipahami dan kenyataan” adalah kesatuan. Oleh karena itu, Hegel meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara ranah “rasio” dan ranah “realitas”. Menurut pandangannya, rasionalitas dan realitas adalah satu; yang dipahami juga merupakan kenyataan, dan yang nyata juga dapat dipahami. Bagi Hegel, “berpikir” dan “ada” adalah satu proses dialektis. (Faza et al., 2022). Hegel mengungkapkan bahwa prinsip dialektis membimbing evolusi jiwa. Baginya, dunia mengalami tahapan perkembangan yang terus menjadi. Sebagai seorang Idealis, Hegel meyakini bahwa inti dari kenyataan bukanlah benda materi, melainkan jiwa. Pemikiran ini mencakup pandangan metafisika bahwa esensi utama realitas adalah ide atau konsep. (Faza et al., 2022).

Tesis: Realitas Politik Indonesia

Peran partai politik dalam sistem politik Indonesia tercermin dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015, yang merupakan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2014 mengenai Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota (Natalia, 2015). Pandangan mengenai realitas politik Indonesia dapat dilihat dari perspektif tesis, dengan mengamati berbagai aspek positif yang telah membentuk politik di negeri Indonesia (Hamad, 2004). Dalam analisis ini, fokus diberikan pada aspek-aspek yang memberikan kontribusi positif, baik dalam konteks sejarah maupun situasi politik kekinian. Pada dasarnya politik di Indonesia adalah tindakan yang memperjuangkan demokrasi dan mendukung suara rakyat. Atas dasar komunikasi politik yang pada awalnya bersifat otoriter dan terfokus pada satu pusat kekuasaan selama rezim Orde Baru, mengalami pergeseran menuju komunikasi politik yang demokratis, terbuka, dan terdesentralisasi atau otonom (Abdussamad, 2008).

Sebagai acuan, sejarah politik Indonesia mencakup perjalanan panjang dari masa kolonial hingga kemerdekaan, di mana perjuangan rakyat Indonesia memunculkan semangat nasionalisme yang kuat (Natalia, 2015). Keberagaman budaya dan suksesnya proses demokratisasi setelah reformasi juga dapat dianggap sebagai prestasi positif dalam dinamika

politik Indonesia. Isu-isu yang diterapkan oleh partai politik berfokus pada keadilan, kesejahteraan, dan persamaan, mengingat bahwa kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tidak dapat diabaikan dari kerangka isu-isu yang adil. Kondisi ini mendorong Partai Politik untuk merumuskan strategi yang mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya, dengan tujuan membangun citra positif di kalangan masyarakat (Sastrawati, 2015).

Salah satu kunci dalam melihat realitas politik Indonesia melibatkan tautan dengan elemen tesis dalam dialektika Hegel (Gazali, 2014). Dalam konsep Hegelian, perubahan politik dapat dilihat sebagai proses dialektis yang melibatkan tesis, antitesis, dan sintesis. Dengan menerapkan pandangan ini pada realitas politik Indonesia, manusia dapat mengidentifikasi karakteristik politik yang muncul sebagai tesis, pertentangan atau kontradiksi sebagai antitesis, dan solusi atau kompromi sebagai sintesis. Pentingnya memahami kaitan antara karakteristik politik Indonesia dengan elemen tesis dalam dialektika Hegel adalah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi dan dinamika politik di Indonesia. Dengan merinci contoh-contoh konkret, baik dari sejarah maupun situasi politik saat ini, manusia dapat mengidentifikasi pola perubahan, pertentangan, dan evolusi yang membentuk realitas politik di Indonesia (Ruhenda et al., 2020).

Merangkum aspek-aspek positif dalam politik Indonesia, menganalisis contoh-contoh konkret, dan menjelajahi tautan dengan elemen tesis Hegelian, pandangan ini memberikan gambaran yang lebih kaya dan nuansa terhadap kompleksitas realitas politik di Indonesia (Mustofa, 2014). Aspek pencitraan politik juga dapat dianalisis melalui prisma demokrasi sebagai fondasi sistem politik yang umum diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia memandang demokrasi dari dua perspektif, yaitu sebagai realitas kehidupan sosial sehari-hari dan sebagai representasi citra di berbagai media informasi. Di satu sisi, terdapat realitas demokrasi, sementara di sisi lain, terbentuk citra demokrasi. Keselarasan antara realitas demokrasi dan citra demokrasi menghasilkan demokrasi yang optimal. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara citra demokrasi dan realitas demokrasi dapat mengakibatkan terbentuknya demokrasi yang tidak sempurna (Sastrawati, 2015). Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam dapat membantu masyarakat dan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan politik Indonesia.

Tesis bahwa realitas politik Indonesia adalah baik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang mencerminkan kestabilan dan perkembangan positif dalam konteks politik negara Indonesia. Indonesia, sebagai negara demokratis terbesar di dunia, telah berhasil mengadopsi dan mempertahankan sistem politik multipartai yang memberikan ruang partisipasi luas kepada berbagai kepentingan politik (Sofyanoor, 2022). Selain itu, perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir juga mencerminkan keberhasilan kebijakan politik yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Keberagaman budaya dan agama yang dihormati secara resmi juga menjadi pilar penting dalam membangun harmoni politik di tengah masyarakat yang heterogen. Meskipun tantangan politik dan sosial tetap ada, tesis ini menegaskan bahwa, secara keseluruhan, realitas politik Indonesia dapat dianggap baik karena kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan stabilitas, pertumbuhan, dan inklusivitas di berbagai sektor.

Antitesis: Tantangan dan Kontroversi Politik Indonesia

Gambaran sederhana tantangan dan kontroversi politik di Indonesia seperti petani padi yang kelaparan di musim panen. Pendapat mengenai tantangan dan kontroversi dalam sistem politik Indonesia sebagai antitesis menggambarkan pandangan yang kritis terhadap dinamika politik di negara Indonesia. Pada dasarnya politik di Indonesia kepentingan nasional namun yang sering terjadi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Meskipun memahami tantangan dan kontroversi adalah langkah penting dalam evaluasi sistem politik, pandangan ini dapat diperdebatkan dari beberapa sudut pandang seperti penegakkan hukum dan Undang-undang yang ada di Indonesia (Nandini et al., 2021). Hukum dan UUD yang ada di Indonesia seperti hiasan rumah, yang dipakai saat ada tamu yang berdasari. Tindakan seperti ini menjadi tantangan dan kontroversi terhadap kebijakan yang ada di Indonesia.

Politik “abu-abu” menyatakan bahwa tantangan dan kontroversi merupakan antitesis dari sistem politik Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran terkait generalisasi. Eufemisme atau penghalusan bahasa telah jauh berkurang dalam wacana politik masa kini, khususnya di Indonesia (Kuntarto, 2018). Kompleksitas politik yang melibatkan berbagai elemen, seperti pemerintahan, partai politik, dan masyarakat. Tindakan seperti menunjukkan ada ketimpangan politik yang mewarnai negara Indonesia. Permasalahan politik yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi antitesis. Memahami bahwa tantangan politik memiliki aspek-aspek yang berbeda-beda dan kontroversi dapat bervariasi dalam keparahan dan dampaknya adalah esensial untuk menghindari kesederhanaan dalam pemahaman terhadap perkembangan politik (Penelitian & Pengabdian, 2023).

Mengidentifikasi hambatan-hambatan terhadap penegakan demokrasi, perlu dicatat bahwa tidak semua kontroversi adalah hal yang negatif. Beberapa kontroversi mungkin muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial atau kebijakan yang amat perlu dipertimbangkan sebagai bagian yang wajar dari proses demokratis. Seperti politik identitas merujuk pada strategi politik yang menekankan dan memprioritaskan pendekatan politik yang terfokus pada identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, gender, budaya, dan perbedaan golongan, dengan tujuan mempengaruhi pandangan masyarakat dan memperoleh dukungan politik (Dinar Astuti et al., 2023). Oleh karena itu, perlu penilaian yang cermat untuk membedakan antara kontroversi yang konstruktif dan tantangan yang mengancam kestabilan demokrasi Indonesia. Politik identitas juga mempengaruhi tindakan moral manusia yang mengarah pada politik dinasti.

Konteks dialektika Hegel, menghubungkan aspek negatif ini dengan elemen antitesis memerlukan analisis yang lebih mendalam. Pentingnya memahami sumber-sumber kontradiksi dan pertentangan dalam politik Indonesia dapat membantu merumuskan solusi yang lebih efektif. Namun, menggunakan pendekatan dialektika Hegel dapat dianggap sebagai suatu cara yang terlalu teoretis dan kompleks untuk menganalisis realitas politik yang sangat dinamis. Seperti kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 semakin menguatkan fakta bahwa pelaku politik setempat menggunakan identitas etnis sebagai alat insentif untuk mencapai penguasaan. Implementasi kebijakan desentralisasi secara nyata memberikan dorongan positif dalam penguatan politik identitas, sehingga narasi "memilih pemimpin berdasarkan kesamaan latar belakang" dapat lebih mudah dibentuk dan diaktifkan dalam konteks lokal (Dinar Astuti et al., 2023). Persoalan terpecahnya politik identitas di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang dimotori oleh elit politik untuk mendapatkan hingga mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik identitas menjadi politik demokrasi (Yeni Sri Lestari, 2018).

Dapat disarankan untuk melibatkan perspektif yang lebih inklusif dalam menilai tantangan dan kontroversi dalam sistem politik Indonesia (Nasirin & Hermawan, 2017). Melibatkan pemangku kepentingan, mendengarkan berbagai suara, dan mempertimbangkan perspektif masyarakat luas dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan memperkuat dasar analisis terhadap antitesis dalam konteks politik Indonesia. 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi PBB sejak tahun 1983 dan lebih lanjut diatur melalui prinsip-prinsip Siracusa yang diadopsi pada tahun 1984 (Mochtar, 2015). Satu hal yang patut manusia renungkan adalah bagaimana manusia menyikapi tingkah laku sebuah pertentangan politik tanpa harus meninggalkan demokrasi dan hukum. Bahwa kultur politik yang menjadi background dari tingkah laku politik Indonesia dalam aplikasinya berupaya untuk mencapai suatu cita-cita negara. Tingkah laku politik harus didasari oleh norma dan etika yang berfungsi sebagai moral politik dari manusia politisi (Grabowski, 1977).

Pendapat ini menawarkan pandangan kritis terhadap tantangan dan kontroversi dalam politik Indonesia (Nikodemus, 2023). Penggunaan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif sangat diperlukan untuk memahami dinamika politik yang lebih lengkap dan memperkuat dasar analisis antitesis tersebut. Demikian juga dengan Kovenan Hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa: "Setiap orang akan berhak mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa diganggu, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri" (Mochtar, 2015). Tindakan seperti ini yang seharusnya diterapkan bangsa Indonesia agar tidak terjadi politik "abu-abu".

Pergulatan Menuju Sintesis: Upaya Penegakan Demokrasi

Gagasan "Pergulatan Menuju Sintesis: Upaya Penegakan Demokrasi" menunjukkan niat yang baik dalam mengatasi tantangan dan mencapai kemajuan demokrasi, pandangan ini juga dapat menimbulkan kritik terkait dengan implementasi dan dampaknya yang sesungguhnya. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung (Rosana, 2016). Definisi demokrasi politik tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, yang menjadi pembuat dan penentu keputusan serta kebijakan tertinggi dalam menjalankan negara dan pemerintahan adalah masyarakat. Rakyat juga memiliki kendali terhadap pelaksanaan kebijakan, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui wakilnya melalui lembaga perwakilan.

Demokrasi dan Pancasila telah menjadi landasan bagi pemerintahan di Indonesia. Meskipun demikian, pada masa Orde Baru, kelompok elit yang mengelola negara sering terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Nasution, 2016). Pertama-tama, diperlukan kritik terhadap kelambanan atau ketidakpastian dalam langkah-langkah atau inisiatif yang diambil. Seringkali, rencana untuk mengatasi tantangan dalam penegakan demokrasi dapat mengalami hambatan dan kendala administratif yang menyulitkan implementasinya. Pergulatan menuju sintesis membutuhkan tindakan konkret dan terukur agar apa yang disebut demokrasi tepat sasaran.

Studi kasus atau contoh konkret yang dijelaskan dalam pandangan ini juga perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana perubahan atau kemajuan telah terjadi. Terkadang, narasi yang dihadirkan dapat terlalu optimis dan tidak mencerminkan realitas di lapangan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap studi kasus diperlukan untuk memastikan bahwa klaim kemajuan benar-benar didukung oleh data dan fakta yang valid. Hal ini sudah ditegaskan, pemerintahan demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, mencakup konsep pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) (Daya Negeri Wijaya, 2016).

Kaitan langkah-langkah ini dengan konsep sintesis dalam dialektika Hegel juga bisa menjadi sasaran kritik. Dalam konteks politik dan sosial, proses sintesis Hegel sering dianggap sebagai hasil dari pertentangan dan kontradiksi yang diatasi untuk mencapai harmoni. Namun, apakah langkah-langkah tersebut benar-benar menciptakan sintesis yang adil dan berkelanjutan atau justru hanya menghasilkan kompromi yang tidak memuaskan dan bahkan tidak ada solusi. Penegakkan hukum adalah unsur penting dalam konsep negara hukum atau negara berdasarkan hukum, yang tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks pemahaman konsep negara hukum di Indonesia, pembahasan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep atau pemikiran negara hukum yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia (Aguayo Torrez, 2021).

Perlu dipertimbangkan apakah penegakkan demokrasi benar-benar mencakup seluruh spektrum masyarakat atau apakah ada kelompok atau suara yang terabaikan. Sintesis yang berhasil seharusnya mencakup kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok-kelompok tertentu dan yang di pinggir. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menulisnya dalam buku *Politics*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu (Aguayo Torrez, 2021):

1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik.

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum memiliki pandangan filosofis yang mendasari prinsip-prinsipnya (Budijanto & Rahmanto, 2021). Konsep ini mencerminkan ide bahwa pemerintahan seharusnya menjadi representasi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Filosofinya terletak pada keyakinan bahwa kekuasaan pemerintah harus digunakan untuk memajukan kepentingan umum, menciptakan keseimbangan, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Tradisi pemikiran politik seperti utilitarianisme menjadi bagian integral dari pandangan ini, seharusnya bangsa Indonesia mampu menegakkan utilitarianisme agar tercapai keadilan bersama.

Pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum memiliki dasar filosofis yang kuat (Fahlevi, 2015). Filosofi di balik konsep ini mencerminkan ide bahwa hukum adalah landasan moral dan etika dalam tindakan pemerintah.

Pemikiran hukum seperti positivisme hukum atau moralitas hukum menekankan bahwa keadilan dan moralitas dapat diukur melalui hukum yang berlaku. Konsep ini bertujuan untuk menentang ide pemerintahan sewenang-wenang dan menegaskan pentingnya hukum yang setara bagi semua warga negara untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum (Alfian, 2019).

Pemerintahan yang berkonstitusi, berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan melalui paksaan atau tekanan despotik, memiliki landasan filosofis yang mencerminkan keyakinan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (Rosana, 2016). Filosofi politik seperti liberalisme atau demokrasi menekankan bahwa pemerintahan yang sah harus berasal dari legitimasi rakyat. Sebuah pemerintah dianggap berkonstitusi ketika bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, menjalankan kekuasaannya dengan tanggung jawab dan keterbukaan. Konsep ini secara konsisten menentang bentuk pemerintahan otoriter atau despotik yang mengabaikan kehendak rakyat (Mulyono, 2017).

Pandangan ini memiliki niat positif dalam menghadapi tantangan dan mencapai sintesis dalam penegakan demokrasi, kritik terhadap kelambanan implementasi, narasi studi kasus yang terlalu optimis, serta pertanyaan terkait inklusivitas dan keadilan dalam sintesis adalah hal yang penting untuk diungkapkan. Kritik ini dapat membantu memastikan bahwa upaya penegakan demokrasi benar-benar efektif, adil, dan berkelanjutan. Maka dari itu, penegakkan demokrasi harus dijalankan dengan tindakan yang konsisten dan tidak mementingkan kepentingan umum.

Refleksi Kritis Terhadap Harmoni Dialektika Hegel

Refleksi kritis terhadap pendapat "Harmoni Dialektika Hegel" dalam konteks politik Indonesia memunculkan beberapa pertimbangan penting. Meskipun konsep harmoni dialektika Hegel dapat memberikan wawasan yang menarik bahkan mengkritik, namun ada aspek-aspek yang perlu dicermati secara kritis. Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa realitas politik Indonesia tidak selalu mencerminkan harmoni dalam konsep dialektika Hegel. Dialektika Hegel menekankan proses menuju sintesis sebagai pencapaian harmoni dari pertentangan dan konflik. Namun, politik Indonesia cenderung dipengaruhi oleh dinamika yang kompleks, terkadang melibatkan ketegangan sosial dan politik yang sulit untuk diatasi sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu dicermati sejauh mana ide harmoni dialektika Hegel dapat diterapkan dalam kerangka politik yang begitu heterogen (Gazali, 2014).

Menghadapi prospek dan tantangan menuju penegakan demokrasi yang lebih baik di Indonesia, penting untuk menilai secara kritis sejauh mana langkah-langkah yang diambil mencapai hasil yang diinginkan (Alfian, 2019). Tantangan dalam implementasi kebijakan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dapat menjadi penghambat dalam mencapai harmoni politik. Pemikiran kritis harus mencakup pertanyaan tentang efektivitas langkah-langkah tersebut dan sejauh mana dampaknya terasa di tingkat masyarakat. Selain itu, perlu diperhitungkan bahwa prospek penegakan demokrasi yang lebih baik tidak selalu menghindari tantangan. Mungkin ada resistensi dari kepentingan politik dan ekonomi yang mapan, serta potensi ketidaksetujuan di antara masyarakat. Oleh karena itu, sebuah refleksi kritis perlu mencakup pemahaman mendalam terhadap kemungkinan kendala dan bagaimana mengatasinya.

Refleksi kritis ini juga harus membahas apakah gagasan harmoni dialektika Hegel mungkin terlalu idealis atau abstrak untuk mencerminkan kompleksitas nyata dalam konteks politik Indonesia. Konsep harmoni seringkali melekat pada pemikiran Hegel yang menekankan peran

rasionalitas dan evolusi menuju keseluruhan. Namun, apakah pemahaman ini relevan dan berlaku di tengah realitas politik yang kadangkala penuh dengan pertentangan dan perbedaan. Dalam keseluruhan refleksi kritis ini, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan konsep harmoni dialektika Hegel sebagai teori filosofis, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas konkret politik Indonesia (Rohani et al., 2022). Analisis yang kritis dan kontekstual dapat membantu mengidentifikasi potensi implementasi dan menciptakan jalan menuju penegakan demokrasi yang lebih baik yang sesuai dengan dinamika negara Indonesia.

Maka penegakan demokrasi di Indonesia memerlukan kritisisme yang konstruktif agar dapat mencapai kedewasaan politik yang lebih baik (Budijanto & Rahmanto, 2021). Meskipun demokrasi telah menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan, tantangan yang dihadapi seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat masih menjadi isu yang perlu diatasi. Kritisisme terhadap demokrasi tidak seharusnya diartikan sebagai penolakan terhadap prinsip dasarnya, melainkan sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem tersebut. Penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan kelembagaan yang kuat guna memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi formalitas politik, tetapi juga berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, Indonesia dapat mengembangkan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi seluruh warganya.

SIMPULAN

Konsep harmoni dialektika Hegel dengan tiga tahapannya tesis, antitesis, dan sintesis memberikan kerangka penting untuk membaca dinamika politik di Indonesia, khususnya dalam perjalanan demokrasi pasca-reformasi. Demokrasi di Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari pergulatan historis dan sosial yang panjang. Dalam logika Hegel, demokrasi di Indonesia dapat dipahami sebagai proses historis yang terus bergerak, ada kondisi awal yang menjadi tesis, yaitu munculnya kesepakatan normatif dan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara demokratis berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Tesis ini memberi arah dan fondasi bahwa politik Indonesia harus menekankan partisipasi rakyat, pemilu yang jujur dan adil, serta adanya mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. Di sinilah terlihat bagaimana harmoni dialektika Hegel mewarnai politik Indonesia demokrasi tidak hadir sebagai sistem yang langsung matang, melainkan terus bergerak melalui pertentangan dan penyempurnaan.

Dari aspek positif sebagai tesis, politik Indonesia telah menorehkan sejumlah pencapaian yang menjadi landasan penting bagi demokrasi. Pertama, adanya reformasi konstitusi yang memperjelas pemisahan kekuasaan dan menegaskan supremasi hukum. Kedua, hadirnya pemilu langsung yang memberikan kesempatan bagi rakyat memilih pemimpin secara bebas, serta mekanisme multipartai yang mencerminkan keragaman aspirasi politik masyarakat. Ketiga, lahirnya lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang secara normatif memperkuat sistem demokrasi. Fondasi inilah yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah imitasi semata, tetapi telah memiliki bentuk khas yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah bangsa. Dengan demikian, tesis ini memberi pemahaman mendalam bahwa meskipun demokrasi Indonesia masih dalam proses, fondasi normatif dan strukturalnya sudah cukup kuat

untuk menopang kehidupan politik yang sehat, meskipun tetap harus dihadapkan pada berbagai tantangan.

Hukum dialektika Hegel, hadir pula antitesis yang justru menyingkap berbagai problematika serius dalam politik Indonesia. Tantangan itu tampak dalam praktik politik yang masih masif, korupsi yang meluas di kalangan elit, lemahnya integritas partai politik, serta maraknya politik identitas yang seringkali mengancam persatuan bangsa. Antitesis ini memperlihatkan sisi gelap dari demokrasi Indonesia yang berlawanan dengan cita-cita tesis. Kehadiran antitesis ini tidak hanya menghambat perkembangan demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga politik. Namun, dalam kerangka harmoni dialektika Hegel, antitesis ini bukanlah akhir, melainkan bagian penting dari perjalanan menuju sintesis yang lebih matang. Implikasinya, demokrasi Indonesia tidak dapat berhenti pada pencapaian formal, tetapi harus terus bertransformasi melalui kritik, reformasi hukum, dan kesadaran politik masyarakat sipil. Dengan kata lain, justru melalui pergulatan antara tesis dan antitesis inilah demokrasi Indonesia dapat menemukan bentuk sintesis yang lebih kontekstual, kuat, dan sesuai dengan cita-cita keadilan serta kedaulatan rakyat.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2008). Tantangan Dan Prospek Komunikasi Politik Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan. *Inovasi*, 5(September), 136–146.
- Agnes Ranubaya, F., Endi, Y., Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, S., & Malang, K. (2023). *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Politeia*, 15 (2) (2023): 121-147 *Kebebasan Politik Menurut Hannah Arendt dan Relevansinya Bagi Masyarakat Indonesia*. 15(2), 121–147.
- Al Azis, M. R. (2021). Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) Dalam Etika Dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 117–122.
- Ariyani, S., Utomo, P., & Cahyanto, H. (2020). Peningkatan kualitas keasaman (ph) pada sumber air untuk industri air mineral dengan metode penyaringan. *Jurnal Borneo Akcaya*, 6(1), 33-42.
- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia * Suatu Telaah Awal Zoning Politics In Educational Practices In Indonesia * A Preliminary Study Pendidikan menjadi isu yang cukup menarik untuk dibahas banyak peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidik. *POLITICON : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57.
- Daya Negeri Wijaya. (2016). KONTRAK SOSIAL MENURUT THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCKE Daya Negeri Wijaya Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang Email: *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 183–193.
- Dinar Astuti, Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(6), 1769–1778.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Junalica*, 12(3), 177–191.
- Faza, F., Malkadani, D. M., Devito, M., Aziz, R. A., & A.F, M. R. (2022). Teori Hukum dan Keadilan Menurut Karl Marx. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–12.

- Gazali, R. (2014). GEORGE WILHELM FREDRICH HEGEL: Metafisika, Epistemologi dan Etika. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(April), 84–92.
- Hamad, I. (2004). Makara Human Behavior Studies in Asia Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Studi Pesan Politik dalam Media Cetak pada Masa Pemilu 1999) (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 8(1), 21–32.
- Huda, M. N., & Riski, Y. T. (2022). *Menghindari berita hoaks dengan cara berpikir filsafat*. 1–7.
- Kewarganegaraan, J., & Endi, Y. (2023). *Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia*. 7(2), 1224–1236.
- Kuntarto, E. (2018). BAHASA DAN KEKUASAAN POLITIK OPOSAN DI INDONESIA: ANALISIS Wacana KRITIS. *Jurnal Kiprah*, 6(2), 37–47.
- Mochtar, Z. A. (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 316.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 29, 19–30.
- Mariani, Y., & Wardenaar, E. (2019). Pemanfaatan tumbuhan obat untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan oleh Suku Dayak Iban: studi kasus di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. *Jurnal Borneo Akcaya*, 5(1), 58-72.
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 40–48.
- Nasirin, C., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 9.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201–212.
- Natalia, A. (2015). beliau adalah staf pengajar di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. *Jurnal TAPIS*, 11(1), 47–68.
- Nikodemus. (2023). Etika relasionalitas naik dango dayak kanayatn menurut konsep kebahagiaan armada riyanto. *Dewaruci: Jurnal Sejarah Dan Pengajaran*, 2(1), 1–14.
- Penelitian, J., & Pengabdian, D. (2023). *SEMAYO* : 1(1), 12–22.
- Rohani, R., Fadillah, F. S., Ernita, M., & Zatrachadi, M. F. (2022). Metode Analisis Dialektika Hegel Untuk Meningkatkan Berfikir Kritis Dan Kreatif Siswa Dalam Pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial. *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1(1), 29.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38–53.
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69.
- Sastrawati, N. (2015). Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 168.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.



- Wahyuddin, I. (2016). Pemikiran Karl Marx Tentang Dialektika. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 211–242.
- Yeni Sri Lestari. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 12.